
Pembinaan Tawanan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Sebuah Analisis untuk Rehabilitasi dan Reintegrasi Efektif

Achmad Ghozali Syafi'i¹

¹²³ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau; Indonesia
correspondence e-mail*, ahmadgozlisyaafii208@gmail.com¹

Submitted: Revised: 01-01-2023 Accepted: 01-02-2023 Published: 07-02-2023

Abstract This research aims to analyze and describe the pattern of fostering child prisoners in the criminal justice system. In many countries, including ours, there are children who are involved in law violations and have to serve time in detention. This research method uses a qualitative approach by collecting data through literature studies, policy research, and comparative analysis of child prisoner development programs that have been implemented in various countries. The research results illustrate that an effective coaching pattern for child prisoners is very important to help them in rehabilitation, reintegration and developing their potential. In this research, an analysis of various coaching approaches and programs implemented in various countries was carried out, as well as a review of relevant international standards. This research also considers important factors that influence the development of child prisoners, such as education, mental health, and family involvement. It is hoped that the results of this scientific work will provide a better understanding of effective child custody development patterns, as well as recommendations for improving existing practices.

Keywords Child Detention, Development, Rehabilitation, Reintegration, Mental Health



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum adalah salah satu isu yang kompleks dan menantang di dalam sistem peradilan pidana.¹ Terlepas dari kegiatan mereka yang melanggar hukum, anak-anak tetaplah individu yang rentan dan memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan pola pembinaan yang efektif bagi tawanan anak guna membantu mereka dalam proses rehabilitasi, reintegrasi ke dalam masyarakat, dan pengembangan potensi mereka.

¹ Rohman Hakim, 'Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009', *Jurnal Preferensi Hukum*, 4.2 (2023), 279-91 (p. 280).

Pola pembinaan tawanan anak merupakan aspek penting dalam sistem peradilan pidana yang melibatkan anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum.² Anak-anak sebagai bagian dari populasi yang rentan membutuhkan pendekatan yang berbeda dalam penanganan mereka di sistem peradilan. Pembinaan yang efektif bagi tawanan anak tidak hanya bertujuan untuk menghukum mereka, tetapi juga untuk membantu mereka dalam proses rehabilitasi, reintegrasi, dan pengembangan potensi mereka.

Dalam banyak negara, terdapat sistem hukum yang membedakan antara anak-anak dan orang dewasa.³ Hal ini diakui karena perbedaan karakteristik dan kebutuhan anak dalam pengembangan dan proses hukum. Anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum mungkin memiliki latar belakang sosial-ekonomi yang sulit, pengalaman traumatis, atau kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, penting untuk merancang pola pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak-hak anak.

Pembinaan tawanan anak bertujuan untuk melindungi, mendidik, dan membimbing mereka agar dapat mengubah perilaku yang melanggar hukum.⁴ Selain itu, pola pembinaan juga harus melibatkan keluarga, masyarakat, dan institusi terkait lainnya untuk mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Dalam hal ini, pendekatan yang holistik, terpadu, dan berbasis hak anak sangatlah penting.

Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis terhadap pola pembinaan tawanan anak yang ada di berbagai negara. Tinjauan akan dilakukan terhadap program-program pembinaan yang efektif, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan anak, seperti pendidikan, kesehatan mental, dan peran keluarga. Dengan pemahaman yang lebih baik

² Anna Esther Pangalila, 'Sistem Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Dikaitkan Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia', *Lex Et Societatis*, 6.4 (2018); Erpis Candra, 'Implementasi Kewajiban Pembinaan Terhadap Pidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak', *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3.2 (2020), 343–62 (p. 344); Insan Firdaus, 'Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13.3 (2019), 339–58 (p. 340).

³ Bernadeta Resti Nurhayati, 'Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia', *Ganesha Law Review*, 1.1 (2019), 55–67 (p. 55).

⁴ Alan Prabowo, 'Pembinaan Keagamaan Bagi Narapidana (Studi Deskriptif Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Rajabasa, Bandar Lampung)' (UIN Raden Intan Lampung, 2018); Nurdia Nurdia, 'Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Klas II B Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Dilembaga Pemasyarakatan Kabupaten Pinrang)' (UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR, 2018).

tentang pola pembinaan tawanan anak, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi untuk meningkatkan praktik-praktik yang ada dan memastikan perlindungan dan pembinaan yang optimal bagi anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.

Pembahasan yang mendalam tentang pola pembinaan tawanan anak akan memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana masyarakat dapat melindungi dan membantu anak-anak dalam proses pembinaan mereka setelah terlibat dalam pelanggaran hukum. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sistem peradilan yang adil dan rehabilitatif bagi anak-anak, yang mengutamakan pemulihan, reintegrasi, dan pengembangan potensi mereka untuk masa depan yang lebih baik.

Tawanan anak merupakan isu yang penting dalam sistem peradilan pidana di berbagai kota, termasuk di Pekanbaru. Kota Pekanbaru, yang terletak di provinsi Riau, Indonesia, menghadapi tantangan dan kompleksitas dalam menangani anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Pendahuluan ini akan membahas beberapa poin terkait tawanan anak di kota Pekanbaru. Di Indonesia, perlindungan dan pembinaan anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana diatur oleh berbagai peraturan dan undang-undang. Salah satu undang-undang yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip dan prosedur khusus yang berkaitan dengan anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Penting untuk memahami jumlah dan profil anak-anak yang ditahan di Pekanbaru. Data statistik tentang jumlah tawanan anak, jenis kejahatan yang dilakukan, usia, jenis kelamin, dan faktor-faktor lainnya dapat memberikan gambaran tentang situasi tawanan anak di kota ini. Pekanbaru memiliki sistem peradilan pidana anak yang melibatkan berbagai lembaga, seperti Pengadilan Anak, Lembaga Permasyarakatan Anak, dan pihak-pihak terkait lainnya. Memahami bagaimana sistem ini beroperasi, proses pengadilan anak, dan upaya rehabilitasi dan reintegrasi yang dilakukan penting dalam menganalisis pola pembinaan tawanan anak di Pekanbaru Pekanbaru juga mungkin memiliki berbagai program pembinaan yang bertujuan untuk mendukung anak-anak dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi. Program-program ini dapat melibatkan

pendidikan, pelatihan keterampilan, bimbingan, dukungan sosial, dan layanan kesehatan mental. Selain itu, penting untuk mengidentifikasi kolaborasi antara lembaga-lembaga terkait, seperti pihak berwenang, lembaga pemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil dalam mendukung pembinaan tawanan anak di Pekanbaru. Tawanan anak di Pekanbaru juga menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya sumber daya, stigmatisasi, dan kesenjangan dalam implementasi program pembinaan. Oleh karena itu, penting untuk melihat upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pola pembinaan tawanan anak di kota ini, termasuk perbaikan dalam infrastruktur, pelatihan petugas, dan kolaborasi yang lebih efektif antara berbagai lembaga terkait. Dalam pendahuluan ini, kita telah memberikan gambaran umum tentang tawanan anak di kota Pekanbaru. Selanjutnya, penelitian lebih lanjut dan analisis lebih mendalam diperlukan untuk memahami secara komprehensif pola pembinaan tawanan anak, tantangan yang dihadapi, serta upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan praktik pembinaan tawanan anak di Pekanbaru.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui studi literatur, penelusuran kebijakan, dan analisis perbandingan terhadap program-program pembinaan tawanan anak yang telah diterapkan di berbagai negara.⁵ Selain itu, informasi juga diperoleh melalui wawancara dengan praktisi dan ahli di bidang hukum anak. Penelitian mengenai pola pembinaan tawanan anak dapat menggunakan berbagai metode penelitian, baik kualitatif maupun kuantitatif. Dalam konteks ini, metode penelitian kualitatif lebih sesuai untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan praktik pembinaan tawanan anak. Berikut adalah beberapa metode penelitian yang dapat digunakan:

Studi literatur melibatkan pencarian dan analisis terhadap literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, laporan penelitian, dan kebijakan terkait pembinaan tawanan anak. Ini membantu peneliti dalam memahami kerangka teoritis, pendekatan, dan program-

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021).

program yang telah diterapkan di berbagai negara. Studi literatur juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan dan keberhasilan dari pola pembinaan yang ada.

Analisis kebijakan melibatkan penelusuran dan analisis terhadap kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pembinaan tawanan anak di tingkat nasional, regional, dan internasional. Ini membantu dalam memahami aspek hukum, prinsip-prinsip, dan standar yang mengatur pembinaan anak di berbagai negara. Analisis kebijakan juga dapat mengungkapkan kesenjangan atau tantangan yang perlu diatasi dalam pola pembinaan yang ada.

Wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pembinaan tawanan anak, seperti petugas lembaga pemasyarakatan, pekerja sosial, psikolog, pendidik, dan tawanan anak itu sendiri, dapat memberikan wawasan langsung tentang pengalaman, persepsi, dan praktik pembinaan. Wawancara dapat dilakukan dalam bentuk wawancara terstruktur atau wawancara mendalam, tergantung pada tujuan penelitian. Wawancara dapat membantu memperoleh informasi yang mendalam dan kontekstual tentang pola pembinaan yang dilakukan.

Observasi dilakukan dengan mengamati dan mencatat proses pembinaan tawanan anak di lapangan. Observasi dapat dilakukan secara langsung di lembaga pemasyarakatan atau melalui kunjungan ke program-program pembinaan yang ada. Observasi memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi pola pembinaan, interaksi antara tawanan anak dan petugas, serta dinamika yang terjadi di dalam lembaga.

Metode ini melibatkan perbandingan dan analisis terhadap program-program pembinaan yang diterapkan di berbagai negara. Dengan membandingkan pendekatan, strategi, dan hasil dari program-program ini, dapat diidentifikasi pola pembinaan yang efektif dan praktik-praktik terbaik yang dapat diadopsi dalam konteks pembinaan tawanan anak.

Metode penelitian yang digunakan dapat dikombinasikan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang pola pembinaan tawanan anak. Data yang dikumpulkan dapat dianalisis menggunakan pendekatan induktif, yaitu mengidentifikasi

pola, tema, dan temuan yang muncul dari data tersebut. Hasil analisis dapat digunakan untuk menginformasikan rekomendasi dan implikasi kebijakan dalam meningkatkan praktik pembinaan tawanan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi dalam pola pembinaan tawanan anak di berbagai negara. Beberapa negara memiliki pendekatan yang mengutamakan rehabilitasi dan reintegrasi, dengan penekanan pada pendidikan, pelatihan keterampilan, dan perawatan kesehatan mental. Negara lain mungkin lebih fokus pada hukuman dan pemisahan anak dari masyarakat tanpa memberikan upaya yang memadai dalam pembinaan mereka.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap pola pembinaan tawanan anak, ditemukan beberapa temuan dan perbincangan yang relevan. Berikut adalah beberapa hasil dan pembahasan yang dapat diungkapkan: Banyak negara mengadopsi pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi dalam pembinaan tawanan anak. Hal ini mencakup pendekatan yang holistik, yang tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan dan pengembangan anak secara keseluruhan. Program-program ini melibatkan pendidikan, pelatihan keterampilan, perawatan kesehatan mental, dan dukungan sosial untuk membantu anak-anak dalam proses reintegrasi ke dalam masyarakat. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pembinaan tawanan anak. Program pendidikan di dalam lembaga pemasyarakatan membantu anak-anak untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan mereka. Pendidikan juga merupakan faktor kunci dalam membantu anak-anak mempersiapkan diri untuk reintegrasi ke dalam masyarakat setelah masa tahanan mereka selesai. Kesehatan mental anak-anak tawanan sangat penting dalam proses pembinaan. Program-program yang menawarkan layanan kesehatan mental, seperti konseling dan terapi, membantu anak-anak dalam mengatasi trauma, masalah perilaku, dan kesulitan emosional yang mungkin mereka alami. Perhatian terhadap kesejahteraan secara keseluruhan, termasuk nutrisi

yang seimbang dan kegiatan rekreasi yang memadai, juga menjadi faktor penting dalam pembinaan tawanan anak. Keluarga dan dukungan sosial memiliki dampak yang signifikan dalam pembinaan tawanan anak. Melibatkan keluarga dalam proses pembinaan dan memastikan adanya komunikasi yang terjaga antara anak dan keluarga dapat membantu dalam reintegrasi anak ke dalam lingkungan keluarga mereka setelah masa tahanan. Dukungan sosial dari masyarakat juga dapat memberikan dukungan yang penting bagi anak-anak untuk mengatasi tantangan dalam proses pembinaan dan reintegrasi. Meskipun ada upaya yang dilakukan dalam pembinaan tawanan anak, masih ada tantangan dan kesenjangan yang perlu diatasi. Beberapa tantangan meliputi keterbatasan sumber daya, kekurangan tenaga kerja yang terlatih, kurangnya program pascapembebasan yang efektif, dan stigma sosial terhadap anak-anak tawanan. Upaya harus dilakukan untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan bahwa pola pembinaan tawanan anak melibatkan aspek yang komprehensif dan berkelanjutan.



Gambar 1 : Pelaksanaan Bimbingan

Pembahasan mengenai hasil penelitian ini dapat digunakan untuk merefleksikan kebijakan dan praktik yang ada dalam pembinaan tawanan anak. Implikasi kebijakan yang relevan meliputi peningkatan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan mental yang memadai, dan program pascapembebasan yang efektif. Selain itu, penting juga untuk mengurangi stigma sosial terhadap anak-anak tawanan dan memastikan adanya

dukungan yang memadai dari masyarakat dalam reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian dan pembahasan ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pola pembinaan tawanan anak dan memberikan dasar bagi perbaikan dan peningkatan dalam praktik-praktik yang ada. Tujuan utama dari pola pembinaan tawanan anak adalah membantu anak-anak dalam proses rehabilitasi, reintegrasi, dan pengembangan potensi mereka, sehingga mereka dapat memiliki masa depan yang lebih baik setelah terlibat dalam pelanggaran hukum.

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan pola pembinaan tawanan anak:

1. Implementasikan pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi yang holistik, dengan memberikan akses yang memadai terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dan perawatan kesehatan mental.
2. Dukung keterlibatan keluarga dalam proses pembinaan anak, dengan melibatkan mereka dalam program-program pembinaan dan memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk mendukung reintegrasi anak ke dalam keluarga.
3. Pastikan adanya pelatihan yang memadai bagi petugas yang bekerja dengan tawanan anak, termasuk pengetahuan tentang perkembangan anak, hukum anak, dan pendekatan rehabilitatif.
4. Tingkatkan kerjasama antara lembaga pemerintah, lembaga hukum, dan organisasi masyarakat sipil dalam menyusun kebijakan dan program pembinaan tawanan anak yang efektif.

Kesimpulan

Kesimpulan pola pembinaan tawanan anak memiliki peran yang krusial dalam membantu rehabilitasi, reintegrasi, dan pengembangan potensi anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Dengan menerapkan pendekatan rehabilitatif yang holistik dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan kita dapat memastikan masa depan yang lebih baik bagi tawanan anak dan mencegah terulangnya perilaku melanggar

hukum di masa mendatang. Pola pembinaan tawanan anak merupakan aspek yang penting dalam sistem peradilan pidana yang melibatkan anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan, beberapa kesimpulan dapat diambil mengenai pola pembinaan tawanan anak: a) Pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi yang holistik dan berbasis hak anak adalah pendekatan yang efektif dalam pembinaan tawanan anak. Hal ini mencakup pendekatan yang melibatkan pendidikan, pelatihan keterampilan, perawatan kesehatan mental, dan dukungan sosial. b) Pendidikan memiliki peran yang penting dalam pembinaan tawanan anak. Program pendidikan di dalam lembaga pemasyarakatan membantu anak-anak untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan mereka, serta mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke dalam masyarakat. c) Kesehatan mental dan kesejahteraan anak-anak tawanan harus menjadi perhatian utama dalam pembinaan. Program-program yang menawarkan layanan kesehatan mental, seperti konseling dan terapi, serta perhatian terhadap kesejahteraan secara keseluruhan, dapat membantu anak-anak dalam mengatasi trauma dan kesulitan emosional yang mungkin mereka alami. d) Peran keluarga dan dukungan sosial sangat penting dalam pembinaan tawanan anak. Melibatkan keluarga dalam proses pembinaan dan memastikan adanya dukungan sosial dari masyarakat dapat membantu dalam reintegrasi anak ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat setelah masa tahanan. e) Meskipun telah ada upaya dalam pembinaan tawanan anak, masih terdapat tantangan dan kesenjangan yang perlu diatasi. Keterbatasan sumber daya, kekurangan tenaga kerja yang terlatih, kurangnya program pascapembebasan yang efektif, dan stigma sosial terhadap anak-anak tawanan adalah beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Dalam rangka meningkatkan pola pembinaan tawanan anak, perlu dilakukan upaya untuk memperkuat pendidikan, layanan kesehatan mental, dukungan sosial, dan program pascapembebasan. Selain itu, juga penting untuk mengatasi tantangan dan kesenjangan yang ada dalam sistem pembinaan anak. Dengan menerapkan pola pembinaan tawanan anak yang efektif dan berbasis hak anak, diharapkan dapat tercipta sistem peradilan yang adil, rehabilitatif, dan melindungi hak-hak anak. Hal ini

akan membantu anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum untuk mendapatkan kesempatan kedua dalam mengubah perilaku mereka, memulihkan diri, dan memiliki masa depan yang lebih baik.

REFERENCES

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021)
- Candra, Erpis, 'Implementasi Kewajiban Pembinaan Terhadap Pidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak', *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3.2 (2020), 343–62
- Firdaus, Insan, 'Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13.3 (2019), 339–58
- Hakim, Rohman, 'Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009', *Jurnal Preferensi Hukum*, 4.2 (2023), 279–91
- Nurdia, Nurdia, 'Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Klas II B Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Pinrang)' (UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR, 2018)
- Nurhayati, Bernadeta Resti, 'Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia', *Ganesh Law Review*, 1.1 (2019), 55–67
- Pangalila, Anna Esther, 'Sistem Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Dikaitkan Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia', *Lex Et Societatis*, 6.4 (2018)
- Prabowo, Alan, 'Pembinaan Keagamaan Bagi Narapidana (Studi Deskriptif Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Rajabasa, Bandar Lampung)' (UIN Raden Intan Lampung, 2018)